

# **KAJIAN MODEL INTERNALISASI IDEOLOGI KEBANGSAAN DI DAERAH PERBATASAN**

**M Mas'ud Said**

## **Excecutive Summary**

The study on Indonesia's national ideology as a glue of national identity, has been one of the most interesting theme in the study of modern Indonesia. Due to its geographical condition, the people living in the border area need to be approached by mode of internalization of national ideology.

This research describes about the common probelms faced by people living in the borders areas and the need of searching and development of a mode of internalization of Indonesia's national ideology.

This research found that in general, the people feelings to be Indonesian are well mainatined and surprisingly fertilyzed. However, new form of internalization of natinal ideology need to be organized and applied in the border area to prevent centiments and eradication of national identity.

This study examines the existing condition in the three borders areas: (1) NTT – Timor Timur, (2) Papua – PNG and (3). Kalimantan Barat, Kab. Sanggau (Kecamatan Entikong) – Malaysia. To gather data and information, visit to the border of Sanggau – Entikong was taken place in November 2009. Intensive visit, Interviews, focus group discussion, questionnaires are employed in this study.

It is seen in the field that the infrastructures and public facilities in the most of Indonesia's borders area in less developed compared with regions in the Java island in general. A significant economic differentials existed. Furthermore the un-availability basic public facilities like health centres, schools and weak state organization and apparatus performances make the condition in the the border become less advantaged.

In the border areas, spoken by people in the meetings, the opposition feeling to central government does exist. The un-satisfied feeling of being treated un-fairly has also been emerged. However the opposition is often framed in terms of resistance to pemerintahan pusat. In Entikong border region, for example, opposition is addressed to the weak response of administrative power in Jakarta or pemerintah pusat and is not opposed to the Javanese.

According to the university students in NTT ( as respondent to this research) they feel that they are happy to be Indonesian and, hoping that some basic infrastructures and falcilities supposed to be developed in their region such as market and schools. Even they live in the poor villages, they feel that they have no problem of being Indonesian. They have no problems and no hate to Javaneses people. They are proud to be Indonesia and will not have intention to separate them selves from Indonesia.

Likely, in Papua some students are keen to be involved in discussing the new move toward a better local development with support from Pusat. They are hoping that the economic level in the local will be better. They tended to wait support from Indonesian government, while some protests occur not merely caused by willingness to a separation of independence, except they want to be treated fairly and are not being left by the government.

The form of internalization of national ideology could be in the mode of giving them *lambang lambang negara*, like national flag, lambang Burung Garuda statue and lagu kebangsaan Indonesia Raya. In Entikong – Sanggau - Kalimantan barat, the existence of Radio Republic Indonesia (RRI) has a significant role in fulfilling daily and solid information about development in Indonesia and to many extent keeping them to be Indonesian. Furthermore, in Entikong, the annual SOSEK Malindo Olympic (Pekan Oleh Raga SOSEK Malindo) is seen as a good mode too. Together with their neighbour ( which some are their family) in Malaysia they are competing each other in sports and cultural performance.

This study suggests that the mode of internalization of national ideology is very urgent to be well organized and developed by the central and provincial government by using local traditional communication modes. This efforts is to keep people in the borders be united. The forms of internalization should be contextual with the tradition and condition of the local.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur diucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan karuniaNya sehingga usaha keras Tim Peneliti untuk mengumpulkan data, mengunjungi lapangan di daerah Perbatasan telah dilaksanakan dan laporan penelitian bisa diselesaikan sesuai jadwal.

Masalah internalisasi jiwa kebangsaan ini sangat strategis artinya, terutama dalam lima tahun belakangan ini. Dan akan menjadi semakin penting maknanya bagi terciptanya Indonesia yang kuat dan terintegrasi. Tiga daerah perbatasan dijadikan fokus penelitian dengan harapan dapat terpaparkan apa yang sedang terjadi di perbatasan dalam konteks internalisasi Ideologi Kebangsaan yaitu Pulau Rote – NTT perbatasan dengan perairan Australia, Perbatasan Entikong – Sanggau Kalbar — Malaysia, dan Papua New Guinea - Papua.

Penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data dengan terjun ke lapangan. Di daerah perbatasan peneliti melakukan wawancara, penyebaran kuisiонаire, FGD kepada pimpinan daerah di Sanggau Kalbar, Camat Entikong dan penyebaran guided interview terhadap kepala desa, siswa SMK, perangkat desa dan visitasi ke daerah perbatasan Malaysia (terlampir).

Sementara di Pulau Rote – NTT dilakukan dengan investigasi lapangan dan pertemuan dengan anggota DPRD, Ketua bapeda Kabupaten Rote Ndao, pengusaha hotel di Rote, tukang ojek, kepala sekolah dan tokoh nelayan di desa Papela. Sedangkan untuk perbatasan Papua – Papua New Guinea dilakukan studi pustaka dan pendalaman diskusi dengan mahasiswa asal Papua yang ada di Malang. Penelitian field work di perbatasan Papua dan PNG akan dilaksanakan pertengahan tahun 2011.

## **KAJIAN MODEL INTERNALISASI IDEOLOGI KEBANGSAAN DI DAERAH PERBATASAN**

### **1. PENDAHULUAN**

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia sering menghadapi persoalan krusial dalam menjaga integrasi bangsa. Integrasi adalah keadaan harmoni antara anggota-anggota dalam masyarakat (Maurice Duverger; 1993). Dalam konteks politik kenegaraan, keadaan seperti ini menuntut kemampuan pemerintah menghilangkan pelbagai bentuk antagonisme dan pergolakan yang dapat mengancam keutuhan masyarakat bangsa.



Doc Pribadi: Tugu Pancasila di Entikong

Bahwa sebuah bangsa terwujud dan kuat apabila memiliki syarat apa yang disebut oleh Soekarno—mengikuti pendapat Ernest Renan—“*le desire d’etre ensemble*” atau kehendak akan bersatu. Soekarno mengingatkan syarat

pendirian suatu bangsa yang didasarkan pada keinginan yang kuat dari setiap elemen masyarakat untuk bersatu.

“Perbatasan adalah konsep geografis spasial. Ia baru menjadi konsep sosial ketika kita berbicara tentang masyarakat yang menghuni atau melintasi daerah perbatasan. Sebagai konsep geografis, masalah perbatasan telah selesai ketika kedua negara yang memiliki wilayah perbatasan yang sama menyepakati batas-batas wilayah negaranya. Dalam pendekatan yang konvensional, daerah perbatasan terutama masih dipandang kaca mata pertahanan keamanan suatu negara, atau dilihat sebagai sekedar daerah frontier yang masih harus dikembangkan secara ekonomi”. (Pusat Pengelolaan Pendapat Umum Badan Informasi Publik Departemen Komunikasi dan Informatik; 2008)

Dalam konteks kelangsungan bangsa, sangatlah penting apa yang disebut dengan ‘mitos integrasi total’, yakni kesempurnaan keadaan harmonis tanpa konflik atau antagonisme, di mana setiap individu melebur dalam suatu komunitas yang lebih besar. Harmoni dalam keadaan yang sempurna, tidak ada antagonisme atau konflik, sulit diwujudkan tanpa design integrasi bangsa.

## **2. IDEOLOGI KEBANGSAAN**

Ideologi bisa dikatakan sebagai paham, ide, atau pemikiran. Dengan pengertian seperti ini, semua orang pada dasarnya mempunyai ideologi. Tetapi konteks penggunaan istilah ideologi tidak sesederhana dalam pengertian tersebut.

Mengikuti konseptualisasi ideologi dari John B. Thompson, istilah ideologi sering digunakan dalam dua cara. Cara pertama, ideologi digunakan dalam konsepsi yang netral (*neutral conception*). Dengan cara ini, ideologi dipahami tidak lebih dari sekedar sebagai sistem berpikir, sistem kepercayaan, praktik-praktik simbolik yang berhubungan dengan tindakan sosial dan politik. Cara kedua dengan memahami ideologi secara kritis yang disebut dengan *critical conception of ideology*. Dalam konsepsi kritis, ideologi selalu dikaitkan praktik relasi kekuasaan asimetris dan dominasi kelas (John B. Thompson, 2003).

Istilah ideologi pertama kali diperkenalkan oleh Destutt de Tracy pada tahun 1796. De Tracy menggunakan istilah ideologi dengan maksud memberi

nama terhadap ilmu dia rancang yaitu tentang ide dan sensasi, tentang makna turunannya, kombinasinya dan akibat yang ditimbulkannya. De Tracy mempunyai pandangan bahwa, pengetahuan manusia terhadap benda tidak diperoleh secara langsung dari benda itu sendiri, tetapi hanya melalui ide-ide yang terbentuk berdasarkan sensasi seseorang terhadap benda-benda tersebut.

Dalam pandangan de Tracy , untuk menganalisis ide dan sensasi secara sistematis, dibutuhkan suatu disiplin ilmu pengetahuan ilmiah yang kuat dan dapat menarik kesimpulan secara lebih praktis. De Tracy mengusulkan nama pengetahuan ilmiah yang dimaksud dengan ideologi— ilmu tentang ide. Pada zaman de Tracy penggunaan istilah ideologi tetap konsisten di jalur keilmuan meskipun de Tracy menyadari adanya kemungkinan ideologi bisa masuk kepada wilayah sosial politik

Ideologi telah menjadi bagian penting dalam menentukan identitas bersama dan dalam menentukan tindakan bersama. Dengan demikian ideology diartikan sebagai:

1. Struktur kognitif, keseluruhan pengetahuan yang dapat merupakan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian dalam alam sekitarnya.
2. Orientasi dasar yang membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia.
3. Norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak.
4. Bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya.
5. Kekuatan yang mampu memberi semangat dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan.

Pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati serta memolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya.

### **3. FENOMENA TERGERUSNYA IDEOLOGI KEBANGSAAN**

Dalam laporan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Widodo A.S dalam rapat Kerja dengan Komisi I DPR, 2 Maret 2009 dikemukakan bahwa beberapa langkah pengamanan dan pengelolaan wilayah perbatasan secara geopolitik dan pendekatan geoekonomi, yaitu

jaminan tegaknya hukum dan kedaulatan serta pembangunan ekonomi dan sosial sebagai perwujudan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Upaya-upaya mendasar mengenai tema ini memunculkan kesimpulan bahwa Indonesia menghadapi tantangan serius, baik internal maupun eksternal, dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jika pada 1 Juni 1945 Soekarno mengingatkan ungkapan Ernest Renan, akhir-akhir ini, Indonesia menghadapi keadaan terbalik atau paradoks dari ungkapan Ernest Renan, yakni “kehendak akan berpisah”.

Beberapa wilayah Indonesia setelah berakhirnya Orde Baru harus terhapus dari peta NKRI setelah memisahkan diri dari Indonesia. Yang pertama adalah Timor Timur atau Timor Leste. Wilayah ini merupakan propinsi ke-27 setelah pada 1976 berintegrasi dengan Indonesia. Tetapi pada 20 Mei 2002 Timor Leste menyatakan diri sebagai negara merdeka dan lepas dari NKRI.

Setelah Timor Timur, pada 17 Desember 2002, *International Court of Justice* atau Mahkamah Internasional memenangkan gugatan Malaysia atau Sipadan dan Ligitan. Sejak itu, kedua pulau terluar itu harus lepas dari NKRI. Setelah menghadapi dua kasus besar tersebut, Indonesia terus-menerus dihadapkan pada tantangan dan ancaman terhadap yurisdiksi dan *soverignty* NKRI, baik yang dipicu oleh pihak luar (eksternal/negara lain), maupun dari pihak “elemen bangsa” Indonesia yang tidak puas dengan kebijakan pemerintah pusat.

Sampai saat ini, Indonesia sering terlibat pertentangan dengan Malaysia terkait dengan status Ambalat yang terletak di laut Sulawesi yang kaya dengan minyak mentah. Ambalat hanyalah salah satu wilayah di perbatasan yang berpotensi mengganggu integrasi NKRI, karena menurut Akhmad Solihin (Sinar Harapan, 10 Mei 2004), Indonesia masih mempunyai permasalahan sengketa perbatasan yang belum terselesaikan dengan sepuluh negara tetangga. Berikut analisis Akhmat Solihin:

Indonesia mempunyai permasalahan “sengketa” perbatasan yang belum terselesaikan dengan 10 negara tetangga. Di antaranya: Indonesia dan Australia

yang telah menyetujui batas bersama ZEE, namun hingga saat ini belum meratifikasi. Aktivitas penambangan pasir laut berdampak mengkhawatirkan pada keberadaan Pulau Nipah sebagai titik dasar dalam penentuan batas wilayah antara Indonesia dan Singapura. Masalah perbatasan wilayah antara Indonesia dan Malaysia di perairan sebelah Pulau Sebatik masih berlarut-larut, ditambah dengan masalah perairan di sekitar Pulau Sipadan-Ligitan pasca-Sidang International Court and Justice (ICJ) tanggal 17 Desember 2002. Juga masalah penetapan ZEE di Perairan Selatan Laut Andaman antara Indonesia dan Thailand. Lalu masalah dengan Filipina yang lebih suka menggunakan Treaty of Paris 1889 ketimbang UNCLOS 1982, sehingga Pulau Miangas masuk ke wilayah Filipina. Permasalahan batas RI - Timor Leste pun belum tuntas.

Temuan Arif Suprpto (2008) memperkuat kekhawatiran peneliti terdahulu lainnya. Indonesia akan mudah terperangkap dalam permasalahan dengan negara tetangga jika tidak segera melakukan penataan dan pengelolaan terhadap wilayah perbatasan yang dimiliki. Sebagai negara kepulauan dengan garis pantai sekitar 81.900 km, Indonesia memiliki wilayah perbatasan dengan banyak negara baik perbatasan darat (kontinen) maupun laut (maritim).

Secara kepulauan wilayah Republik Indonesia, berbatasan dengan Malaysia, Papua New Guinea (PNG) dan Timor Leste. Sedangkan wilayah laut, Indonesia, analisis Arif Suprpto lebih lanjut, berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste, dan PNG.

Selain ancaman dari pihak luar terhadap keberlangsungan integrasi NKRI, yang perlu diperhatikan adalah kondisi masyarakat atau warga negara Indonesia (WNI) yang mendiami wilayah perbatasan. Dari segi demografis, menurut Lukman Edy, jumlah penduduk yang tinggal di wilayah perbatasan per akhir tahun 2006 sebanyak 4,4 juta jiwa atau rata-rata per kabupaten perbatasan sekitar 174.018 jiwa.

Kendati relatif sedikit jika di bandingkan dengan jumlah penduduk di wilayah lainnya, penduduk Indonesia yang tinggal di wilayah perbatasan perlu mendapat perhatian karena kondisi sosial ekonomi mereka pada umumnya berada di bawah garis kemiskinan. Kondisi seperti ini jelas tidak menguntungkan bagi pemeliharaan integrasi karena adanya kecenderungan

psikologis dari masyarakat untuk membandingkan dengan kondisi ekonomi masyarakat di negara tetangga yang relatif lebih makmur.

Disparitas ekonomi, baik dengan masyarakat di negara tetangga, maupun dengan masyarakat di wilayah Indonesia lainnya, mudah menimbulkan apa yang disebut oleh Ted Robert Gurr (1970) dengan *relative deprivation* (deprivasi relatif). Konsep dari Ted Robert Gurr ini biasanya digunakan untuk menjelaskan terjadinya konflik dan kekerasan baik yang bersifat vertikal (massa dengan elite atau negara) maupun horizontal (massa dengan massa). Dengan mengacu pada konsep deprivasi relatif, konflik dan kekerasan dipahami sebagai konsekuensi dari kesenjangan yang dirasakan oleh masyarakat antara ekspektasi terhadap kondisi kehidupan tertentu dengan kenyataan sesungguhnya.

Pada tingkat global, seperti yang ditunjukkan oleh kajian yang dilakukan Syamsul Hadi, dkk. (2006), beberapa negara yang tidak bisa menyelesaikan konflik internal yang pada akhirnya berujung dengan disintegrasi seperti yang terjadi di Yugoslavia. Menurut analisis Syamsul Hadi, dkk. terjadinya disintegrasi, antara lain, disebabkan oleh ketidak mampuan negara dalam mengelola kemajemukan etnisitas yang juga bertali-temali dengan persoalan disparitas ekonomi.

#### **4. INTERNALISASI IDEOLOGI KEBANGSAAN DI DAERAH PERBATASAN**

Karena Indonesia memiliki beragam etnis, ditambah dengan adanya disparitas ekonomi, maka wajar jika konflik dan kekerasan juga terjadi. Sejumlah penelitian—antara lain Lambang Trijono, dkk. (2004a, 2004b), Riza Sihbudi, dkk. (2001), dan Syafuan Rozi, dkk. (2006)—menghasilkan kesimpulan bahwa salah satu akar konflik dan kekerasan internal (massa *versus* massa dan massa *versus* negara) adalah kondisi disparitas ekonomi.



Pada kasus kemiskinan warga negara Indonesia yang tinggal di wilayah perbatasan, kendati (kemiskinan) tidak atau belum memicu aksi konflik dan kekerasan, setidaknya mengalami keterpecahan kepribadian (*split personality*) sebagai warga negara Indonesia. Dalam kajian antropologi terdapat istilah yang dapat digunakan untuk menggambarkan fenomena keterpecahan kepribadian yang (mungkin) dialami oleh sebagian warga negara Indonesia di wilayah perbatasan, yakni liminalitas dari Victor Turner (Y.W. Wartaya Winangun, 1990), suatu kondisi kejiwaan “tidak di sana dan tidak di sini”.

Perasaan tidak disana dan tidak disini itu akan mudah dialami oleh warga negara Indonesia di wilayah perbatasan jika negara tidak mampu melakukan—langkah “*reaggregation*” atau pengintegrasian kembali masyarakat ke dalam wilayah Indonesia, tidak saja dalam arti geografis, tetapi juga ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Dalam hal ini Ian Chalmers, 2006.

“Third, an associated rise in the regional sentiments and more strident assertions of the regional identity have threatened the very future of the unitary republic; some have predicted that the country will fragment as some of its component provinces seek independence.”

Salah satu studi signifikan mengenai masalah perbatasan ialah studi yang telah dilakukan tahun 2008 oleh Tim yang dibentuk oleh Pusat Pengelolaan Pendapatan Umum Badan Informasi Publik Departemen Komunikasi dan Informatika guna mengidentifikasi isu publik yang ada di kawasan perbatasan dan menyusun rekomendasi kebijakan penanganan permasalahan di daerah perbatasan langsung dengan negara tetangga.

Dalam laporan tersebut dikemukakan bahwa - sebuah negara, atau state's border, sebagaimana dikemukakan oleh Riwanto Tirtosudarmo, (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia-LIPI) dikenal bersamaan dengan lahirnya negara. Dikatakan bahwa perbatasan selalu dijadikan atau menjadi wilayah perebutan antar negara, terutama dalam hal penentuan sepihak batas negara.

Tapal batas selalu mengikuti teori zero sum game, dimana penentuan sepihak dalam hal penentuan perbatasan akan mempengaruhi batas negara tetangganya. Dan kadang-kadang penentuan wilayah ini dekat dengan kepentingan atau interest ekonomi, politik negara bertetangga. Eksistensi negara, riwayat daerah perbatasan tidak mungkin di lepaskan dan sejarah kelahiran dan berakhirnya berbagai negara.

Laporan tersebut juga mengatakan bahwa perbatasan sebuah negara menunjukkan sesuatu yang kompleks. Penentuan tapal batas tidak hanya membelah etnisitas yang berbeda. Ia bahkan membelah etnis yang sama, karena adanya sejarah kebangsaan yang berbeda oleh warga etnis yang sama.

**Negara (State) adalah** institusi yang memiliki kekuasaan dan kekuatan untuk mengatur masyarakat dimana didalamnya juga terdiri dari bagian-bagian kecil yang menjadi obyek 'yang diperintah'. Bagian-bagian kecil itu dianggap telah menyerahkan kekuasaannya secara sukarela maupun karena hukum untuk mengambil keputusan. Sub-sub sistem yang ada dalam negara harus mengikuti kesepakatan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Robert Dahl sebagaimana dikutip oleh kelompok ahli ilmu politik Hague, Harrop dan Breslin menulis:

The state refers to the authoritative decision making institutions for an entire society, to which all other groups, institutions and persons are legally subject. In other words, the state is legally supreme: the last resort, its authority is compulsory. The state is the ultimate regulator of the legitimate use of force within its territory. (Dahl, 1984 dalam Hague dkk, 1993)

Peran negara dalam internalisasi ideologi kebangsaan penting untuk dikuatkan dalam hubungannya dengan hal ini disebabkan dua alasan. Pertama, semua negara (birokrasi) harus memperhatikan rakyatnya, karena keberadaan dan arah masyarakat akan mengikuti aparatur negara dan selalu akan wajib mengikuti arah kebijakan dan arah politik negara.

Kedua, yang bertanggung jawab atas kinerja negara adalah birokrasi baik pusat maupun daerah. Begitu negara berdiri secara legal formal, maka

birokrasi baru bekerja sesudah kelahirannya. Dalam ilmu negara dikenali dan diasumsikan bahwa birokrasi bekerja untuk negara. Birokrasi adalah alat negara dan pemerintahan dalam berbagai manajemen pemerintahan.

Sampai berabad-abad peralihan peradapan manusia dari dulu hingga sekarang, dunia ini hanyalah satu. Di dunia sekarang terdapat sederetan negara yang jumlahnya sampai 260 lebih, termasuk mereka yang belum menjadi anggota PBB. Dengan kata lain, semua orang baik di barat maupun di timur, baik hidup di kutub selatan maupun di kutub utara berinteraksi dengan otoritas negara dan terkait baik secara langsung maupun tidak dalam otoritas sebuah atau beberapa negara.

Walaupun seseorang tidak memiliki kewarganegaraan secara formal ataupun mereka yang memiliki berbagai kewarganegaraan toh dia hidup dalam lingkup negara. Ilmu yang mempelajari asal muasal, tujuan didirikannya negara dan prinsip-prinsip untuk mengatur manusia untuk hidup bersama dalam sebuah wilayah dan otoritas negara tertentu disebut ilmu negara.

Secara filosofis, sebagaimana dikemukakan oleh PJ Soewarno (2005), negara merupakan pengertian yang cukup kompleks. Dalam pengertian hukum internasional imbuhnya negara adalah lembaga yang memiliki pemerintahan yang berdaulat, rakyat yang menjadi warga negara dan wilayah tempat berlakunya kedaulatan pemerintahan itu.

Lebih jauh lagi PJ Soewarno menjelaskan makna negara sebagai kondisi moral, negara merupakan sintesis antara kemerdekaan universal dan kemerdekaan individual, maka negara yang baik bukan negara itu mempertahankan tertib hukum, tetapi karena mengusahakan penyatuan yang universal dan yang partikular. Dia mengatakan negara berkuasa kalau tidak menyeleweng dari prinsip-prinsip negara yang asli dengan kualitasnya sebagai negara kesejahteraan yang makmur baik material maupun absolut.

Penelitian P3U – BIP – Depkominfo, tahun 2006 menemukan bahwa :

Pembangunan kawasan perbatasan mempunyai nilai strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional, khususnya dalam aspek kedaulatan negara, peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat,

serta pertahanan dan keamanan, baik skala regional maupun nasional. Karena itu, ketahanan kawasan perbatasan perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh. Kerap kali masyarakat yang berdiam di kawasan perbatasan dapat berhubungan langsung dengan masyarakat di negara tetangga tanpa melalui prosedur ketat. Lantaran jalur darat merupakan lalu lintas perdagangan tradisional yang sudah berlangsung lama dan kerap menjadi pilihan bagi sarana interaksi antar masyarakat.

## **5. HASIL PENELITIAN DAN KESIMPULAN**

Dari data, fakta, investigasi dan kunjungan di lapangan, terdapat fenomena bahwa internalisasi ideologi kebangsaan sangat penting untuk dilakukan secara sengaja, terstruktur dari pusat dengan organisasi yang kuat rapi dan memiliki mandat penuh. Bentuk dan pola itu bisa berupa penguatan forum-forum warga dan kendaraan sosial yang didalamnya ada tokoh masyarakat dan pejabat di daerah yang bersangkutan.

Model internalisasi daerah yang ada justru efektif melalui kelompok berpengaruh (di NTT). Di NTT ketidak hadirannya pemerintah atau lemahnya pemecahan masalah diperburuk dengan kultur masyarakat yang terlihat enggan berinteraksi dan bekerja keras. Tokoh adat dan pemerintah seperti di Papua dan RRI plus perangkat daerah seperti Kecamatan seperti di Entikong. Di Perbatasan Malaysia ini peran RRI bisa menangkal ketidak hadirannya informasi mengenai Indonesia karena sebelumnya dikuasai radio tetangga (Malaysia).

Acara tahunan bersama seperti Titian Muhibah dan olah raga tahunan dalam kerangka SOSEK Malindo membangkitkan jiwa nasionalisme kebangsaan Indonesia saat mereka bertanding persahabatan melawan Malaysia. Bentuk internalisasi tak langsung ini sangat disukai warga, dan model ini perlu dikembangkan. Model tersebut kita beri nama model Entikong.

Penelitian ini juga menemukan begitu banyak masalah antara lain terbatasnya infrastruktur di daerah perbatasan, lemahnya koordinasi dan kecilnya "kehadiran negara" sehingga masyarakat melihat pelanggaran perbatasan sebagai hal-hal yang terbiasa dan diterima sebagai kenyataan.

Pada tahap selanjutnya, perlu segera disepakati bentuk, pola dan variasi pola internalisasi ideologi kebangsaan agar pada suatu saat nanti kita dan generasi penerus akan melihat Indonesia yang lebih kuat, lebih bersatu karena mereka, terutama yang hidup di daerah perbatasan memiliki jiwa nasionalisme dan ideologi nasional.

Pancasila, bendera merah putih, penataran kebangsaan, kebanggaan sebagai bangsa dari pembenahan infrastruktur. Kebanggaan menjadi warga dengan keberadaan institusi pendidikan, mudahnya pelayanan kesehatan. Dan ini harus merupakan bagian integral dari internalisasi ideologi kebangsaan dari berbagai model yang akan diintroduksi dan diindoktrinasi. Dengan kata lain ia tidak berjalan dalam kondisi *vacuum*. Ancaman, godaan dan rayuan negara tetangga kadang bisa menggerus ideologi kebangsaan di warga daerah perbatasan, oleh sebab itu model yang kontekstual dengan daerah masing-masing harus diperkuat oleh pemerintah pusat dan propinsi.

Kini yang menjadi persoalan adalah, bagaimana menguatkan proses integrasi agar warga negara Indonesia di wilayah perbatasan tidak berada dalam kondisi liminalitas, apalagi memilih jalan konflik dan kekerasan. Dalam kajian akademik terdapat beberapa kajian yang dapat dijadikan bahan acuan, antara lain studi Maurice Duverger. Dalam salah satu bukunya, *The Study of Politics* (1972), Maurice Duverger menyebut empat langkah sistematis untuk melakukan politik integrasi, yakni:

- (1) Merumuskan aturan-aturan prosedur;
- (2) Mengorganisir pelayanan-pelayanan kolektif dan pola umum dari aktivitas sosial;
- (3) Memberikan pendidikan kewarganegaraan (*civic education*); dan
- (4) Mempergunakan kekuatan dalam menghadapi gerakan yang melawan hukum;

Berbagai Penelitian membenarkan stateman bahwa sebagai bagian dari warga negara Indonesia, masyarakat di perbatasan, misalnya, memiliki ekspektasi agar kehidupan ekonominya tidak jauh berbeda dengan warga negara Indonesia di kawasan lainnya. Tetapi ekspektasi ini tidak bisa dipenuhi karena—setidaknya menurut masyarakat yang mengalami kondisi

deprivasi relatif—pemerintah dinilai tidak menaruh kepedulian terhadap mereka. Dalam kondisi seperti ini, mereka lalu memilih jalan konflik terhadap pihak-pihak yang dinilai menciptakan kondisi deprivasi relatif.

Perkembangan yang paling mengkhawatirkan yang patut diperhatikan oleh pemegang kebijakan di Indonesia dari kondisi deprivasi relatif adalah keinginan masyarakat untuk menentukan nasibnya sendiri (*self-determination*), dan berpisah dari NKRI. Sebagai negara kepulauan dan sekaligus negara berkembang yang terus-menerus dihadapkan dengan persoalan ekonomi, Indonesia telah lama dihadapkan dengan isu *self-determination*.

Integrasi menurut Benedict Anderson—merupakan kondisi masyarakat yang dibayangkan (*imagined community*) oleh para bapak pendiri bangsa (*the founding fathers*). Pembahasan tentang integrasi memiliki relevansi dengan kondisi kontemporer Indonesia masa kini ditengah ancaman laten disintegrasi.

Selanjutnya dalam buku kajian yang mendalam, Ian Chalmers mencatat bahwa setidaknya sampai pada masa akhir akhir ini, masih terdapat gejala fragmentasi dan ancaman terhadap bentuk negara kesatuan. Dikemukakan bahwa Indonesia kini sedang menghadapi apa yang ia sebut sebagai ancaman fragmentasi. Bahkan ia menyebut kondisi kekinian itu akan bisa menentukan kelanjutan dan masa depan bentuk negara kesatuan. Berikut ini petikan studynya:

“an associated rise in the regional sentiments and more strident assertions of the regional identity have threatened the very future of the unitary republic; some have predicted that the country will fragment as some of its component provinces seek independence.” (Chalmers, 2006, p. 31)

Internalisasi ideologi dalam hal ini, perasaan sebagai orang Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan akan berperilaku sebagai bangsa Indonesia. Sedangkan dalam proses ini negara dalam hal ini pemerintah pusat dan

daerah adalah salah satu penanggung jawab akan nasib warga di daerah perbatasan.

Semoga semakin banyak data dan fakta seperti dikemukakan dalam penelitian ini, semakin jernih kita melihat masalah. Semakin valid kita mengemukakan akar masalah semakin mudah dalam mengatasinya.